

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PERKARA
DUGAAN PEMALSUAN DATA OLEH PARA PIHAK
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor
385 K/Pid/2006)

OLEH :

RANGGA PRAYUDHA PUTRA
BP : 1720123063

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH Pembimbing I

Dr. Azmi Fendri, SH., MKn Pembimbing II



PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PERKARA
DUGAAN PEMALSUAN DATA OLEH PARA PIHAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 385 K/Pid/2006)**

(RANGGA PRAYUDHA PUTRA, NIM : 1720123063, Program Studi Magister
Kenotariatan Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 100
hlm, 2020)

ABSTRAK

Notaris yang melakukan pelanggaran undang-undang atau kode etik dapat dijatuhkan sanksi yaitu merupakan sanksi perdata dan sanksi administratif. Didalam UUJN tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris apabila mengandung unsur-unsur pemalsuan atau kesengajaan/ kelalaian dalam pembuatan surat/ akta otentik yang keterangan isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif dan atau kode etik profesi notaris dan sanksi keperdataan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengkaji tentang : 1) Apa yang melatarbelakangi terjadinya perkara Nomor 385 K/Pid/2006 tentang dugaan pemalsuan pemalsuan data oleh para pihak? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 385 K/Pid/2006 sehubungan dengan pemalsuan data oleh para pihak? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris sehubungan dengan pemalsuan data oleh para pihak dalam perkara nomor 385 K/Pid/2006?. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan berupa data dari peraturan-peraturan yang terkait dan buku-buku. Jenis data yang digunakanya itu Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa penyebab terjadinya pemalsuan data dikarenakan Notaris telah mengabaikan persyaratan-persyaratan yang dipenuhi oleh Notaris sebelum membuat akte sahnya jual beli. Akan tetapi dalam hal ini Notaris telah memalsukan data surat kuasa yang telah dibuatnya. Pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut adalah perbuatan pemalsuan data tersebut bukan tindak pidana yang diperuntukkan kepada Notaris melainkan sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu pihak yang sengaja memalsukan dokumen. Perlindungan Hukum terhadap Notaris dengan adanya hak-hak istimewa dari notaris yaitu hak ingkar, kewajiban ingkar dan hak eksklusif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Perkara Pemalsuan

Legal Protection for a Notary in the Case of Data Falsification by the Parties

(Case Study Of Decision Number 385 K / Pid / 2006)

(Rangga Prayudha Putra, NIM: 1720123063, Masters in Notary, Post Graduates,
Faculty Of Law

Andalas University, 100 Pages, 2020)

ABSTRACT

A notary who violates the law or code of ethics can be imposed sanctions that are civil and administrative sanctions. In the Law does not mention the application of criminal sanctions but a legal action against violations committed by a notary if they contain elements of forgery or intentional / negligence in making authentic letters / deeds whose information is false, then after being imposed with administrative sanctions and notary code of ethics and profession civil sanctions. Based on this, the researcher examines: 1) What is behind the occurrence of case Number 385 K / Pid / 2006 concerning the alleged falsification of data falsification by the parties? 2) What are the judges' considerations in Decision Number 385 K / Pid / 2006 regarding the falsification of data by the parties? 3) What is the legal protection of a notary regarding data falsification by the parties in case number 385 K / Pid / 2006? Writing this thesis uses the normative juridical approach. Data collected in the form of data from related regulations and books. The type of data used is Secondary Data consisting of primary, secondary and tertiary legal material. From the results of the study it was found that the cause of the data falsification was because the Notary had ignored the requirements fulfilled by the Notary before making the sale and purchase deeds valid. However, in this case the Notary has falsified the power of attorney data that he has made. The judge's consideration in the decision was that the data falsification was not a criminal offense intended for a notary public but a criminal act committed by one of the parties intentionally falsifying documents. Legal Protection of a Notary Public with special rights from a notary public, namely renegade rights, denial obligations and exclusive rights.

Keywords: Legal Protection, Notary, Case of Data Falsification